

Globethics Repository



Doktrin tanpa Kontekstualitas

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Saputro, M. Endy
Publisher	IAIN Surakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-10 17:48:16
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/158907

DOKTRIN TANPA KONTEKSTUALITAS DISKURSUS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR DI YOGYAKARTA

Oleh : M. ENDY SAPUTRO¹

Abstract: *This study aims to understand the relationship between the subject of Islamic Education (PAI) in elementary school (SD) in Yogyakarta – especially moral subject – with the multisocio-culture reality in the city. Through the analysis of two textbooks teach, this study argues that the Islamic discourse in teaching textbooks Esis states that adopt the standards more presents exclusive material, which is far from multi-reality (berbhinneka) in Yogyakarta. At the same time, education-al-Islam that modify the state standards with an emphasis on value-Kemuhammadiyah, can be an alternative way of looking at reality discourse berbhinneka in Yogyakarta, although it is not sufficient. With these findings, the study concluded that the materials, especially the morals, the two textbooks tend exclusive teaching-not putting material in condition with a variety of religious communities.*

Keywords: buku teks ajar, Pendidikan Agama Islam, sekolah dasar, Yogyakarta

Pendahuluan

Berdasarkan perhitungan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah total penduduk Yogyakarta adalah 3.457.491 jiwa. Dari sisi pemeluk agama, muslim masih menjadi mayoritas di provinsi ini, dengan jumlah berdasarkan Sensus Penduduk BPS pada tahun 2010 mencapai 3.179.129 jiwa. Data ini cenderung naik dibandingkan dengan jumlah umat Islam di Yogyakarta berdasarkan Sensus BPS tahun 2000, yaitu 3.059.957 jiwa. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada jumlah umat Kristen dan Katolik pada kurun sepuluh tahun tersebut. Akan tetapi, kecenderungan sebaliknya terjadi pada pemeluk agama Hindu dan Buddha yang mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Perkembangan tiga agama tersebut bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh migrasi mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah ke Yogyakarta yang kemudian bermukim dan menjadi penduduk kota ini secara administratif. Adapun faktor penurunan, khususnya dalam umat Buddha, kemungkinan besar terjadi karena pengakuan kembali Khonghucu sekitar

¹Endy Saputra adalah anggota Indonesian Consortium For Religious Studies (ICRS), Yogyakarta.

tahun 2010 oleh pemerintah. Di tahun 2000, Khonghucu belum ditanyakan dalam Sensus Penduduk, sehingga banyak umat Khonghucu yang mengaku Buddhisme. Setelah tahun 2010, Khonghucu mendapatkan haknya dalam Sensus Penduduk 2010.

Agama	Jumlah Pemeluk Tahun 2000	Jumlah Pemeluk Tahun 2010
Islam	3.059.957	3.179.129
Kristen	89.924	94.268
Katolik	158.962	165.749
Hindu	6.209	5.257
Buddha	5.728	3.542

Sumber: Hasil Sensus BPS 2000 dan 2010

Terlepas dari ketepatan angka-angka tersebut, dengan kondisi keberagaman seperti itu, penulis ingin menunjukkan bahwa Yogyakarta tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Akan tetapi, di Yogyakarta, kita dapat menemui masyarakat yang memeluk lima agama lain dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Selain itu, dalam kasus Islam misalnya, meskipun hanya terkesan hanya ada satu Islam dalam daftar BPS tersebut, namun pada kenyataannya ada beragam aliran Islam dengan karakter ajaran masing-masing. Untuk menyebut beberapa di antaranya yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia, Salafi, dan Ahmadiyah. Dengan realitas seperti ini, tidak berlebihan apabila Yogyakarta disebut sebagai kota berbhinneka.

Di level pemerintah, Yogyakarta dikonstruksikan sebagai kota toleransi. Menurut Zudianto (2008: 100), prinsip toleransi di kota Yogyakarta harus dibaca dalam kerangka kota pendidikan yang berwawasan kebangsaan. Dia menandakan bahwa keindonesiaan semestinya diutamakan melampaui sekat-sekat berbagai kultur sukubangsa yang mewarnai Yogyakarta. Zudianto mencontohkan, bagaimana konflik-konflik kecil di kalangan antarasrama daerah tidak seharusnya dimaknai sebagai konflik antarsuku bangsa, akan tetapi konflik antarmahasiswa Indonesia. Bukannya tanpa maksud, hal tersebut sebenarnya merupakan mekanisme-mekanisme pengelolaan harmoni yang berkait erat dengan turisme. Jadi, prinsip pengelolaan keberagaman yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta dikonstruksikan dalam level ekonomi politik.

Kebhinnekaan Yogyakarta, bagaimanapun, merupakan resepresentasi kondisi masyarakat di suatu daerah, yang bukan tidak mungkin juga dapat ditemui di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana kemudian pendidikan agama bersinergi dengan realitas kebhinnekaan ini? Pemerintah memandang pendidikan agama sebagai upaya-upaya pedagogis mendalami ajaran agama tertentu. Agama yang dimaksud di sini tentu salah satu dari enam agama yang diakui secara eksplisit dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965, yaitu Hindu, Buddhisme, Islam, Katholik, Protestan dan Khonghucu. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendalaman ajaran agama menjadi *fungsi* pendidikan

keagamaan; akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 hal tersebut menjadi *definisi*. Dari kebingungan ini, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah belum mampu memberikan pemaknaan jelas pendidikan keagamaan. Hal ini diperparah dengan penghadapan definisi pendidikan keagamaan dengan pendidikan agama (dalam peraturan pemerintah yang sama) yang tidak memiliki perbedaan signifikan.

Terlepas dari hal itu, pemerintah terkesan eksklusif dalam mengelola pendidikan agama/keagamaan. Akan tetapi, kurang tepat apabila kata eksklusif di sini dipahami dalam kacamata positif atau negatif. Lebih tepat jika eksklusif di sini dimaknai dalam rangka pemberian fondasi nilai-nilai religiusitas seseorang sejak pendidikan anak usia di sini sampai jenjang mahasiswa strata satu. Permasalahannya adalah bagaimana apabila eksklusivitas ini berubah menjadi sikap fanatik, dalam arti memandang seakan-akan agamanyalah yang layak hidup di Indonesia dan mengacuhkan eksistensi agama-agama lain sebagai entitas yang juga laik berkembang secara setara di negeri ini.

Permasalahan kedua adalah terjadinya nasionalisasi pendidikan agama/keagamaan. Sebagaimana kita tahu, pemerintah adalah subjek otoritatif yang berhak mengelola dan mendisiplinkan pendidikan agama/keagamaan melalui segala produk legalitas. Pengaturan ini tidak hanya dalam hal kurikulum, akan tetapi menjangkau segala hal terkait dengan pendidikan agama/keagamaan, misalnya buku ajar dan bahan-bahan penunjangnya. Salah satu akibat dari pengaturan ini antara lain menutup pintu-pintu tafsir dan ijtihad akademik dalam bidang pendidikan agama/keagamaan. Kemungkinan lain, apabila ada ijtihad atau usulan lain terkait pendidikan agama/keagamaan akan dianggap sebagai kurang otoritatif.

Apakah nasionalisasi pendidikan agama/keagamaan dapat mengakomodasi realitas keagamaan yang bersifat lokal (daerah)? Agama, bagaimanapun, tidak dapat dilepaskan dari akomodasi, adaptasi atau sinkretisasi dengan kultur-kultur kelokalan. Bahkan, agama-agama, termasuk Islam, memberi dan diberi karakter oleh nilai-nilai kelokalan tersebut. Di Indonesia, partikularitas Islam tersebut tampak dalam penyebutan agama ini secara geografis, contoh yang paling tampak adalah Islam Jawa. Islam Jawa dibedakan dari Islam daerah-daerah lain karena para pemeluknya mampu mencangkokkan nilai-nilai Islam ke dalam pandangan dunia kejawaan (Woodward 2011); bahkan mensinkretiskan norma Islam dengan tradisi Hinduisme (Geertz 1960).

Pertanyaan Penelitian dan Signifikansi

Berdasarkan pembahasan di atas, ada sebuah kegelisahan ilmiah yang harus diselesaikan segera. Pertama, pendidikan agama/keagamaan yang dikelola oleh pemerintah pusat telah berurat-berakar di segenap ruang pendidikan di Indonesia, dari sekolah dasar sampai strata satu. Salah satu media konstruksi pendidikan agama/keagamaan ini adalah melalui buku-buku teks ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Untuk itu, penelitian ini mencoba melihat hubungan antara materi akhlak PAI dengan realitas, dengan mengambil dua buku teks ajar sebagai subjek analisis, yaitu *Esis* dan *Pendidikan Al-Islam*.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana diskursus buku teks ajar *Esis* dan *Pendidikan Al-Islam*? Paling tidak ada dua urgensi memahami jawaban atas pertanyaan ini. Pertama, dengan memahami secara mendalam diskursus *Esis* berarti memahami konstruksi pendidikan yang dilakukan oleh BSNP — sebagai representasi dari Pusat/Pemerintah. Kedua, dengan memahami *Pendidikan Al-Islam* berarti memahami diskursus PAI sekolah dasar di Yogyakarta yang ditawarkan

oleh PWM Yogyakarta — sebagai representasi dari Lokal/Ormas (Organisasi Massa Islam). Penulis sengaja membuat oposisi biner antara Pusat/Lokal untuk menunjukkan bahwa pewacanaan pendidikan, dalam hal ini PAI, tidak dapat dilepaskan dari kuasa institusi tertentu. Kuasa di sini dapat diartikan secara luas, baik ideologi atau kepentingan tertentu, yang mengindikasikan sebuah konstruksi identitas, seperti kemunculan diskursus tentang *standar nasional* atau *kemuhammadiyahan*. Pembongkaran kuasa-kuasa dalam pewacanaan PAI ini sekaligus merupakan signifikansi dari penelitian ini.

Sebagaimana sebagian kita mengetahui, akhir tahun 2012, diskursus tentang pendidikan di Indonesia diwarnai dengan rencana penetapan kurikulum standar nasional baru pada tahun 2013. Merespons hal ini sebagian pengamat pendidikan berapologetik, apa kepentingan politis di balik pergantian kurikulum ini. Apologetik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diskursus kurikulum standar nasional yang ditawarkan senantiasa menawarkan frame kurikulum yang terkesan solutif, seperti *Rencana Pembelajaran* (1947) atau *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (2006); akan tetapi apakah hal ini mengubah substansi pendidikan yang bertujuan melakukan rasionalisasi, dalam arti materi-materi di dalamnya telah melek realitas? Sayangnya, masalah-masalah seperti ini pada kenyataannya lebih berhubungan dengan masalah anggaran belanja (*Kompas* 12 Oktober 2012, hlm. 33).

Kita dapat menduga, pergantian kurikulum nasional akan berdampak pada perubahan-perubahan di semua lini pendidikan, termasuk PAI. Akan tetapi, kita pun dapat mengajukan pertanyaan, apakah perubahan-perubahan tersebut berdampak signifikan pada perubahan PAI? Pertanyaan lain, apakah nasionalisasi pendidikan, termasuk PAI, hanya merespons kebutuhan-kebutuhan di tingkat Pusat (Jakarta) dan tidak merespons adaptasi-adaptasi lokal? Hal ini tentu memunculkan spekulasi bahwa PAI yang selama ini diajarkan justru tidak melek-realitas.

Meskipun diskursus PAI dielaborasi secara umum dalam penelitian ini, akan tetapi fokus utama penulis adalah materi-materi yang ada kaitannya dengan akhlak. Penulis memposisikan akhlak sebagai konstruksi pergaulan antara muslim dengan nonmuslim, sehingga penting dilihat bagaimana materi tersebut dikonstruksikan dalam buku teks PAI Sekolah Dasar. Melalui analisis materi akhlak ini pula, hubungan antara buku teks PAI dan realitas dapat dilihat dengan jelas.

Sepanjang pengamatan penulis, penelitian tentang buku teks ajar PAI cenderung menggunakan standar analisis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam mengevaluasi buku teks ajar tertentu. Pada level Pendidikan Anak Usia Dini, penelitian dari Balitbang Kemenag RI Semarang dapat disebut di sini (2005). Fokus penelitian ini adalah bahan ajar PAI dan implementasinya di lapangan. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PAI di PAUD yang diteliti masih jauh dari standar yang diharapkan, karena guru-gurunya belum mengikuti sertifikasi. Pada level Sekolah Menengah Pertama (SMP), skripsi Solikhah (2011) dapat dijadikan contoh. Sama halnya dengan yang pertama, dengan standar BSNP, Solikhah berupaya untuk menganalisis standar isi buku teks PAI kelas VII SMP terbitan Yudhistira dan Cempaka Putih. Komparasi ini menemui kesimpulan bahwa penerbit pertama lebih baik dalam hal penyajian daripada penerbit kedua, meskipun tidak dapat dikatakan lebih aplikatif.

Pada level SMA, penelitian tentang topik ini telah dikerjakan oleh Balitbang Kemenag RI Jakarta (2012). Empat buku teks ajar yang diambil adalah terbitan Erlangga, Grafindo, Platinum dan Yudhistira kelas X, XI, XII SMA. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengembangan materi yang berkaitan dengan PAI belum kentara di dalam produk-produk keempat penerbit tersebut. Padahal, sebagaimana diamanatkan oleh BSNP, materi-materi terkait dengan Hak Asasi Manusia

seharusnya dapat dikembangkan dalam buku teks PAI. Sebagaimana penelitian-penelitian dalam topik ini, alasan pemilihan mengapa SMA atau SMP belum begitu jelas. Selain itu, analisis masih terfokus pada telaah isi dengan standar BSNP.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tentang buku teks ajar di atas, penelitian ini memposisikan standar BSNP sebagai konstruksi diskursus PAI yang akan dilihat relevansinya dengan konteks kota Yogyakarta. Hal ini untuk menguji apakah negara merespons realitas keagamaan di tingkat lokal melalui buku teks ajar di tingkat SD. Analisis komparatif juga tidak membandingkan antara dua penerbit yang mengikuti standar pemerintah; akan tetapi satu penerbit yang mengikuti standar negara dan satu penerbit representasi institusi alternatif (Muhammadiyah). Dengan demikian, kontinuitas dan diskontinuitas diskursus PAI konstruksi negara dan institusi alternatif dapat dilihat dalam kaitannya dengan realitas lokal Yogyakarta.

"Standar Nasional" PAI

Bagaimana PAI dipandang dari level nasional? Untuk menjawab hal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, "Pendidikan nasional berfungsi ... membentuk watak serta peradaban bangsa ... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar ... beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia" Beberapa poin yang patut digarisbawahi dalam pasal ini adalah peradaban bangsa, iman dan takwa dan berakhlak mulia. Sebelumnya, mari kita bandingkan pasal tersebut dengan pasal 4 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, "Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, ... yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur" Dalam pasal ini, kata-kata yang layak digarisbawahi adalah kehidupan bangsa, iman dan taqwa dan budi pekerti luhur.

Berdasarkan dua UU Sisdiknas itu, kita dapat melihat komponen-komponen nasional dalam pendidikan. UU Sisdiknas yang lama meletakkan kehidupan bangsa, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur sebagai pilar pendidikan nasional. Hal ini agak bergeser dalam UU Sisdiknas yang baru: peradaban bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Satu kata yang tidak berubah adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implikasi hal ini adalah pendidikan nasional meletakkan semangat beragama secara monoteis sebagai fondasi. Fondasi ini semakin terkesan Islami ketika perwujudan nilai dan sikap pendidikan nasional adalah akhlak mulia. Tentu, kata akhlak mulia secara mudah dapat dipahami berdasarkan agama (Islam). Jika dilihat dalam UU Sisdiknas sebelumnya, pendasaran tersebut lebih terkesan netral, meskipun sangat Jawa, karena didasarkan pada budi pekerti luhur yang tentu proses adopsi budi pekerti itu sendiri bersifat lokal. Secara sederhana, penulis dapat ringkas bahwa ruh pendidikan nasional berada dalam batas agama.

Kemudian kata peradaban di UU Sisdiknas baru, dengan kata kehidupan bangsa di UU Sisdiknas lama. Kata memperadabkan, senada dengan akhlak mulia tadi, sangat terkesan Pusat-Pinggiran. Artinya, pendidikan-pendidikan di tingkat pinggiran musti disesuaikan dengan aturan-aturan Pusat. Implikasi dari proses ini antara lain adalah potensi *stereotyping* pedagogi-pedagogi lokal yang dianggap sebagai *uncivilized* dan oleh karena itu harus diperadabkan. Implikasi ini akan menemukan perbedaannya apabila dipakai kata mencerdaskan. Kata ini lebih dapat menampung

nalar-nalar lokal sebagai bagian dari kecerdasan. Nalar lokal karenanya dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk kecerdasan nasional, sehingga muatan-muatan pendidikan lokal dapat dimasukkan secara lebih leluasa.

Masih tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 23 Tahun 2003, pasal 4, ayat 1, pemerintah secara tegas menandakan bahwa standar penilaian pendidikan merujuk pada HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Di sini, HAM dan nilai keagamaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang normatif; sedangkan nilai kultural dan kemajemukan bangsa merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan didahulukan antara HAM dan nilai keagamaan di depan nilai kultural dan kemajemukan bangsa apakah hal itu berarti pemerintah mementingkan aspek normatif, daripada kenyataan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat lagi tujuan penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan UU Sisdiknas tersebut. Menurut penjelasan pasal 37 UU Sisdiknas tersebut, "Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia." Jika dikontekstualisasikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam uraian sebelumnya, penjelasan pasal 37 tersebut sangat bernuansa normatif. Di mana letak nilai-nilai kultural dan kemajemukan bangsa, apabila iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa didahulukan di atas yang lain?

Alih-alih penghormatan nilai-nilai kultural dan kemajemukan bangsa, pendidikan agama agaknya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dalam agama. Pasal 12 ayat 1, UU Sisdiknas No. 23 Tahun 2003, menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk dan dididik oleh pendidik yang seagama. Ketika menafsir pasal ini, penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007, secara terang-terangan menjelaskan bahwa pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian agama. Sampai di sini, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa pendidikan agama cenderung dinuansakan secara normatif untuk menjaga nilai-nilai dan tatanan agama.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Dalam pasal 1 peraturan tersebut, pendidikan agama diselenggarakan untuk "memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya".. Dari sini, pendidikan dan pengalaman agama memiliki batas tipis. Pola-pola ini diperteguh dengan pengaturan-pengaturan dalam pemilihan guru agama, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan proses kontrol lainnya. Apakah hal tersebut semata untuk menjaga kemurnian agama?

Di sini terjadi ambivalensi. Sebagaimana di atur dalam pasal 6 Peraturan Menteri agama tersebut, tujuan standar isi pendidikan Agama selain digunakan untuk memberi fondasi moral kepada peserta didik, juga dilaksanakan untuk "mewujudkan kerukunan antar umat beragama". Hal ini diperkuat dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, "Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama." Dari dua pasal ini, harmoni antarumat beragama menjadi prioritas dalam proses pendidikan agama. Yang menarik, pemerintah juga menyadari bahwa realitas satu agama tidaklah tunggal, sehingga pendidikan agama yang menghargai pluralitas suatu agama perlu dilaksanakan pula. Kata intraagama, bagi penulis, menyaratkan sebuah pengakuan hubungan aliran-

aliran pemahaman dalam suatu agama, baik yang dianggap mainstream maupun nonmainstream. Namun, apakah hal ini juga berlaku bagi penganut Ahmadiyah dan Syi'ah?

Beralih ke PAI. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 211 Tahun 2011, tujuan penyelenggaraan PAI di sekolah dapat dibagi ke dalam dua garis besar. Pertama, aspek fikih, melingkupi pendidikan ajaran dan ritual-ritual di dalam Islam. Kedua, aspek muamalah, meliputi hubungan antarsesama dan lingkungan. Dalam kenyataannya, dua garis besar ini diejawantahkan ke dalam lima pokok aspek PAI, yaitu Alquran dan hadits, Akidah, Akhlak, Fikih/ibadah dan Sejarah. Jika dijabarkan, aspek fikih meliputi Alquran/Hadits dan Fikih/Ibadat. Sedangkan aspek muamalah terdiri dari akhlak dan tarikh.

Ada empat komponen penilaian buku teks ajar yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks. Aturan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 43 ayat 5. Dalam penelitian ini, keempat penilaian tersebut diposisikan sebagai diskursus. Untuk mempermudah penyajian, diskursus PAI tersebut disederhanakan menjadi tiga, yaitu isi, bahasa dan visualisasi.

Esis: Representasi PAI Nasional

Esis merupakan terbitan Erlangga. Terbitan ini menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikeluarkan oleh negara sebagai panduan dalam menyusun buku. Hal ini dapat dilihat dari substansi-substansi materi yang dipaparkan dalam setiap bab. Meskipun begitu, substansi disajikan dengan peta konsep pembahasan yang sangat interaktif. Setiap bab terdiri dari beberapa subpembahasan.

Pertama, tadarus dan cerita pengantar, disertai dengan gambar pendukung. Menurut pengamatan penulis, terma tadarus di dalam setiap bab tidak mengeksplisitkan surat tertentu, sehingga hal ini agaknya diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Cerita pengantar sangat berguna dalam membuat peserta didik mengkontekstualisasikan materi di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan simak cerita pengantar, yang termuat dalam buku *Esis* kelas I, halaman 2.

hari ini awal tahun ajaran baru
anisa dan ilham duduk di kelas satu
pukul tujuh pak guru masuk kelas
pelajaran pertama adalah pendidikan agama islam
hari ini kita akan belajar membaca surah al fatihah
begitu kata pak guru
mengapa surah al fatihah pak guru tanya anisa
mau tahu jawab pak guru
ayo kita pelajari

Cerita pengantar tersebut biasanya diikuti oleh gambar penunjang, yang di beberapa tempat diulang-ulang. Meskipun begitu, visualisasi gambar cukup mencegah monotoni peserta didik dalam membaca.

Subpembahasan berikutnya adalah aktivitas Islam yang berisi kegiatan peserta didik, seperti

menghafalkan. Sub ini membantu guru dalam hal penilaian terhadap hafalan-hafalan tertentu. Selain itu, dalam subpembahasan ini ada pula *mutiara Islam*, yang berisi kata-kata bijak dari hadis, cerita dan lain sebagainya yang sering tidak disebutkan sumbernya. *Mutiara Islam* membantu peserta didik dalam memahami kemanfaatan setiap materi yang dibahas.

Secara naratif, selain *mutiara Islam*, dalam subbab selanjutnya ada *sepenggal kisah*. Kisah-kisah yang dihadirkan berisi narasi cerita Islam yang menggambarkan tauladan tertentu yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya adalah intisari materi dan soal. Soal-soal yang disajikan kebanyakan bertipe pilihan ganda, sehingga menjauhkan peserta didik untuk berpikir secara kreatif. Di setiap bab, ada juga soal-soal yang berkaitan dengan tajwid. Akan tetapi, sekali lagi, guru berperan dalam pengajaran tajwid ini.

Materi akhlak dalam *Esis* terkandung dalam bab sifat terpuji dan menghindari perilaku tercela. Ada dua model pembangunan akhlak dalam buku ini. Pertama, pembangunan yang bersifat ke dalam, artinya pembangunan peserta didik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti rajin, bekerja keras dan disiplin. Kedua, pembangunan dalam hubungannya dengan orang lain, semisal, taat dan tolong menolong kepada orang lain.

Sepanjang analisis penulis, dalam hal hubungan dengan orang lain, buku ini lebih memakai kata *sesama* untuk menyebut saudara-saudara non-Muslim, daripada merujuk langsung ke pemeluk Kristen, Katholik, Buddha atau Hindu, ketika penceritaan sikap dan praktik tolong-menolong. Selain itu, cerita-cerita yang disajikan, berbentuk doktrin, dan tidak merupakan kutipan dari cerita-cerita sungguhan yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan model ini bersifat normatif eksklusif, karena mengimajinasikan bahwa masyarakat yang ada hanyalah Islam, dan yang lain dipandang secara *undefined* (tidak terdefinisi).

Dalam pada itu, di beberapa tempat, bahkan Islam diproyeksikan sebagai agama yang hanya ada di masyarakat. Hal ini dapat digambarkan dalam halaman 110-111 kelas VI dari buku *Esis* ini. Subbab ini berisi tolong menolong, yang dalam sebuah kutipan kalimatnya berbunyi, "Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar mau menolong orang yang tertimpa musibah." Frasa 'orang yang tertimpa musibah' dalam bayangan penulis adalah netral, tidak memandang agama, akan tetapi mengapa dalam penjelasan tentang manfaat tolong menolong salah satu itemnya berbunyi, "terjalinnnya hubungan ukhuwah islamiyah yang kuat." Tentu, hal ini menandakan bahwa hanya orang Islam yang ditolong ketika bencana.

"Standar Muhammadiyah" PAI

"Terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sebagai perwujudan tadjid dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*." Inilah visi kurikulum PAI yang diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (Majelis Dikdasmen DIY) 2012-2013. Sebagaimana pemerintah, Majelis Dikdasmen DIY memiliki kurikulum sendiri sebagai sendi dan fondasi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dasar Muhammadiyah. Dari kutipan tersebut kita dapat membaca bahwa visi utama PAI Muhammadiyah adalah membentuk manusia pembelajar yang memiliki integritas di bidang spriritual, ilmu pengetahuan dan seni. Pendidikan agaknya juga dimaknai sebagai bagian dari dakwah.

Pendidikan Agama menurut standar Majelis Dikdasmen DIY 2012 terdiri dari tiga jalinan rumpun keilmuan, yaitu Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab. Standar Pendidikan Al-Islam lebih banyak memiliki kesamaan dengan standar PAI nasional. Adapun Kemuhammadiyah lebih banyak menguraikan tentang sejarah perkembangan Islam Indonesia, terutama persyarikatan Muhammadiyah. Bahasa Arab sendiri agaknya merupakan ilmu alat untuk memahami dua pilar utama Islam, yaitu Qur'an dan Sunah. Ketiganya memiliki bukunya masing-masing.

Menarik disimak, kurikulum PAI Muhammadiyah memiliki dua tujuan utama yang merupakan manifestasi dari hubungan antara manusia dengan Allah, dan hubungan antarsesama manusia. Pertama, "menumbuhkembangkan akidah Islam" yang dilakukan dengan pembiasaan bersikap takwa. Kata menumbuhkembangkan merupakan pilihan kata yang fleksibel terhadap perkembangan zaman maupun konteks. Kedua, "mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlakul karimah" dengan penjelasan bahwa taat beragama yang dimaksud adalah berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif dan inovatif; sedangkan berakhlakul karimah adalah jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, dan harmonis antara sosial dan personal. Bagi penulis menarik bahwa toleransi menjadi salah satu indikator akhlak.

Ruang lingkup PAI Muhammadiyah juga lebih luas dibandingkan dengan standar pemerintah. Selain lima komponen yang juga distandarkan pemerintah, Majelis Dikdasmen DIY juga memasukkan komponen Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab. Dua hal ini yang menjadi pembeda, sekaligus karakter dari PAI Muhammadiyah. Bagaimana pengejawantahan komponen-komponen tersebut dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar?

Berdasarkan uraian di atas, Muhammadiyah memiliki diskurs PAI-nya sendiri, yang dibangun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu keislaman, kemuhammadiyah dan bahasa Arab. Konsep 'keislaman' merupakan sebuah ketundukan Muhammadiyah kepada negara; namun dengan memasukkan konsep kemuhammadiyah, ketundukan tersebut dibarengi dengan sikap kreatif dalam mengaplikasikan ideologi mereka sendiri. Adapun bahasa Arab merupakan sebuah media vital dalam memahami Islam, sehingga menurut Muhammadiyah bahasa Arab penting diajarkan sejak dini agar peserta didik mampu memahami Islam sesuai dengan bahasa turunnya Alquran.

Pendidikan Al-Islam

Paling tidak ada enam subpembahasan dalam setiap bab *Pendidikan Al-Islam*. Pertama, *serambi*, mirip dengan cerita pengantar dalam *Esis*. Kedua, *peta konsep*, merupakan tabel sistematisasi pembahasan dalam setiap bab, yang menguraikan jalinan antarpembahasan. Selanjutnya, materi inti, diteruskan dengan kisah teladan, kamus mini, penugasan dan ujian komprehensif.

Dibanding dengan *Esis*, kutipan-kutipan di dalam *Pendidikan Al-Islam* lebih terbuka; tidak hanya terkait dengan sumber internal Islam, akan tetapi kutipan-kutipan umum yang memiliki kandungan pendidikan karakter. Akan tetapi, kebanyakan kutipan berasal dari blog. Hal ini tentu memberikan contoh yang tidak baik kepada peserta didik, karena meskipun sah, kebenaran akademis di blog sangat dipertanyakan dan validitas akademisnya diragukan. Selain itu, kutipan blog di setiap gambar sangat menjemukan.

Jalinan ketujuh subpembahasan di dalam setiap bab *Pendidikan Al-Islam* agaknya dibuat secara koheren, satu subpembahasan berkaitan dengan subpembahasan lain. Peserta didik dimanjakan

oleh model ini, karena mereka dapat menemukan kesegaran dalam memahami materi; tidak hanya menghafalan tetapi juga pembacaan kisah teladan, misalnya. Koherensi ini semakin lengkap dengan ketersediaan kamus. Melalui kamus, peserta didik dapat memahami kata-kata sulit dalam bahasa Arab secara mudah.

Bagaimana dengan akhlak? Sebagaimana *Esis*, kisah-kisah tauladan di dalam *Pendidikan Al-Islam* cenderung berisi cerita rekaan, daripada fakta yang terjadi di masyarakat. Meskipun diterbitkan dan digunakan di Yogyakarta, gambaran keyogyakartaannya tidak terlalu mewarnai. Penulis hanya menemukan penyampaian peristiwa gempa Mei 2006. Selain itu, penyebutan eksplisit non-Muslim sebagai kata ganti *sesama* dalam pembahasan tolong-menolong juga belum mewarnai. Akan tetapi, ada satu kisah yang menceritakan tentang seorang Yahudi pada masa Nabi Muhammad.

Dalam *Pendidikan Al-Islam* kelas VI halaman 140 – 142, diceritakan antara akhlak Nabi Muhammad dengan Yahudi buta. Setiap hari Yahudi buta tersebut didatangi oleh seseorang yang menyuapkan makanan kepadanya. Pada saat yang sama, Yahudi itu mewanti-wanti agar orang tadi tidak mendekati Nabi Muhammad karena dia seorang pembohong dan gila. Pada suatu saat, Abu Bakarlah yang mendatangi dan menyuapi orang tadi. Akan tetapi, orang Yahudi tahu dan bertanya dimanakah orang biasanya. Oleh Abu Bakar, bahwa orang biasanya telah meninggal dan dia adalah Nabi Muhammad. Cerita seperti ini dapat menjadi preseden bagi peserta didik untuk memahami bagaimana seharusnya dia berinteraksi dengan non-Muslim di kota Yogyakarta.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang diskursus Pendidikan Agama Islam SD di Yogyakarta. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Diskursus nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebuah konstruksi pusat (Jakarta) atas daerah. Hal ini menyebabkan ajaran-ajaran PAI jauh dari realitas keislaman di daerah. Sebagaimana analisis yang penulis lakukan terhadap buku *Esis*, buku teks ajar ini hanya mengikuti begitu saja standar isi BSNP, tanpa melihat realitas kemajemukan agama di Yogyakarta. PAI standar nasional lebih berorientasi pada fikih-pengamalan, daripada muamalah-sosial. Detail praktik-praktik ibadah tidak dibarengi dengan topik-topik yang menunjukkan realitas kemajemukan agama, bahkan Islam, sendiri di Yogyakarta. Contoh kongkrit dari hal ini adalah topik sikap terpuji yang tidak serta merta menyebut sesama manusia sebagai teman-teman non-Islam.

Dari sisi isi, penyajian *Esis* memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan materi PAI. Narasi pengantar dapat merangsang peserta didik untuk berimajinasi di mana seharusnya konteks materi diletakkan. Uraian materi dan soal juga dibuat agar berkesinambungan, namun tetap menuntut pemikiran yang kreatif. Visualisasi gambar, huruf arab dan tabel secara jernih dan menjelaskan ikut menjadi keunggulan tersendiri bagi buku teks ajar ini.

2. Diskursus *Pendidikan Al-Islam* merupakan sebuah alternatif terhadap Pusat. Hal ini dapat dilihat dari dari modifikasi materi-materi PAI yang lebih sistematis dibandingkan dengan standar nasional pemerintah. Selain itu, *Pendidikan Al-Islam* patut diapresiasi karena memasukkan satu subtopik tentang toleransi antaragama di dalam terbitannya, meskipun hal tersebut belum memadai dalam konteks Yogyakarta.

Sistematika penyajian materi dalam buku teks *Pendidikan Al-Islam* menggunakan bahasa pointer yang ringkas. Narasi pengantar tidak begitu memberikan konteks; akan tetapi uraian cukup

menjelaskan apa yang mau disampaikan. Soal-soal disajikan secara kreatif dan menjadikan buku ini dapat berdiri sendiri tanpa atau dengan *Lembar Kerja Siswa*. Visualisasi gambar memiliki kualitas kurang bagus, dan karenanya justru mengganggu penyampaian materi.

Rekomendasi

1. Kompetensi dasar seharusnya diarahkan untuk menampung realitas-realitas keislaman lokal, sehingga muncul buku-buku teks yang memasukkan keislaman lokal di dalamnya dan realitas keberagamaan lokal di daerah masing-masing. Rangsangan untuk menggali narasi-narasi keberagamaan lokal kemudian perlu digalakkan dan dijadikan materi-materi di dalam buku teks ajar Pendidikan Agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan tidak terlalu jauh dari realitas.

2. Fikih memang penting dalam pendidikan agama Islam di level sekolah dasar, akan tetapi muamalat sosial juga tidak kalah penting. Penyajian sikap terpuji dan senada dengan hal itu sebaiknya disampaikan secara toleratif, bukan hanya menyinggung dan memvisualisasikan sesama Islam, namun juga hubungan antara muslim dengan agama lain. Hal ini dimaksudkan agar PAI di tingkat SD tidak terjebak pada sikap fanatisme agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Chicago: Free Press
- New Teaching Resource. 2004. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas I*. Jakarta: Esis.
- New Teaching Resource. 2004. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas II*. Jakarta: Esis.
- New Teaching Resource. 2004. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas III*. Jakarta: Esis.
- New Teaching Resource. 2004. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas IV*. Jakarta: Esis.
- New Teaching Resource. 2004. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas V*. Jakarta: Esis.
- New Teaching Resource. 2004. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas VI*. Jakarta: Esis.
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas I*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas I*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas 6*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas 1*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas 3*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas 4*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sofyan, Ahmad Tri. 2012. *Pendidikan Al-Islam: Panduan Anak Shalih Berakhlaqul Karimah SD/MI Muhammadiyah Kelas 5*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Solikhah, Nikmatu. 2011. "Analisis Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas VII SMPN 13 Malang," *Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Woodward, Mark. 2011. *Java, Indonesia and Islam*. Doodrecht, Heidelber, London dan New York: Springer.
- Zudianto, Hery. 2008. *Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur*. Yogyakarta: Impulse.